Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, POPULASI, UMR, DAN INFLASI TERHADAP UTANG DI INDONESIA

Yonathan Theofelick Gunawan[1*], Khairudin[2]

Program Studi Manajemen[1,2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis[1,2]
Universitas Bandar Lampung[1,2]

Correspondent Author: yonathan.22011265@student.ubl.ac.id

Author Email: khairudin@ubl.ac.id

Received: July 13, 2026**. Revised:** November 20, 2026**. Accepted:** November 26, 2026**. Issue Period:** Vol.10 No.4 (2026), Pp. 1163-1172

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), dan inflasi terhadap utang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel sederhana yang mencakup 38 provinsi di Indonesia selama periode 2023-2024 sehingga diperoleh 76 observasi. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomu berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang daerah, sedangkan populasi berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, UMR dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap utang daerah. Secara simultan, seluruh variabel independent berpengaruh signifikan terhadap utang daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika utang daerah di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan demografis dibandingkan faktor kebijakan pengupahan dan stabilitas harga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan utang yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Economic Growth, Population, Minimum Wage, Inflation, Debt*

Abstract: *This study aims to analyze the effect of economic growth, population size, the Regional Minimum Wage (UMR), and inflation on debt in Indonesia. This study uses a quantitative approach using simple panel data covering 38 provinces during the 2023–2024 period, resulting in 76 observations. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The results indicate that economic growth has a positive and significant effect on regional debt, while population has a negative and significant effect. Meanwhile, regional minimum wages and inflation do not have a significant effect on regional debt. Simultaneously, all independent variables significantly affect regional debt. These findings suggest that regional debt dynamics in Indonesia are more strongly influenced by economic and demographic factors than by wage policy and price stability. This study provides policy relevant insights for sustainable regional debt management.*

Keywords: *Economic Growth, Population, Minimum Wage, Inflation, Debt*

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

I. PENDAHULUAN

Utang publik merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menutup kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran negara [1]. Di satu sisi, utang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal apabila tidak dikelola secara hati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan utang pemerintah dan utang daerah di Indonesia menjadi perhatian publik seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan serta tekanan ekonomi akibat perlambatan global.

Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan utang bersifat dua arah [2]. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pemerintah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap utang. Namun, pada saat yang sama, daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi juga cenderung memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih besar sehingga berpotensi meningkatkan penggunaan utang. Selain pertumbuhan ekonomi, faktor demografis seperti populasi juga berperan dalam memengaruhi kapasitas fiskal daerah melalui perluasan basis pajak dan tenaga kerja [3].

Faktor lain yang relevan dalam dinamika utang daerah adalah kebijakan pengupahan dan stabilitas harga. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) berpotensi memengaruhi struktur belanja pemerintah daerah, sementara inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi makro yang dapat berdampak pada nilai riil utang [4], [5]. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap utang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, UMR, dan inflasi terhadap utang daerah di Indonesia dengan menggunakan data terbaru tingkat provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi literatur ekonomi publik serta menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan utang daerah yang berkelanjutan.

II. METODE DAN MATERI

Teori Crowding Out

Teori *crowding out* menjelaskan bahwa peningkatan utang publik dapat meningkatkan permintaan dana di pasar keuangan sehingga mendorong kenaikan suku bunga dan menekan investasi swasta. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena sektor swasta kehilangan ruang untuk berkembang. Reinhart dan Rogoff [2] menegaskan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi apabila tidak dikelola secara hati-hati. Panizza dan Presbitero [1] menambahkan bahwa dampak *crowding out* tidak selalu terjadi secara otomatis, melainkan bergantung pada efektivitas penggunaan utang dan kondisi institusional suatu negara. Dengan demikian, pengelolaan utang yang produktif dan transparan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif *crowding out*.

Utang Publik

Utang publik merupakan kewajiban pemerintah yang timbul akibat pembiayaan defisit anggaran dan kebutuhan pendanaan pembangunan. Utang digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Khairudin dan Tanto [6] menyatakan bahwa kinerja pengelolaan utang memiliki implikasi langsung terhadap kondisi keuangan dan keberlanjutan fiskal. Selain itu, Aminah *et al.* [7] menekankan bahwa kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Dalam perspektif teori *crowding out*, utang publik dijelaskan sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi keseimbangan ekonomi makro melalui mekanisme pasar keuangan. Reinhart dan Rogoff [2] menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat menekan pertumbuhan ekonomi apabila tidak dikelola secara hati-hati. Panizza dan Presbitero [1] menegaskan bahwa dampak utang terhadap perekonomian tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada efektivitas penggunaan utang dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, teori *crowding out* menjadi *grand theory* yang menjelaskan peran dan implikasi utang publik dalam perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan output barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan karena

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kumar dan Woo [8] menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi, tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Data makroekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik [9] juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi kinerja perekonomian nasional dan regional.

Dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dipandang sebagai hasil dari interaksi antara kebijakan fiskal, struktur ekonomi, dan kapasitas produksi. Triwibowo *et al.* [10] menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal bersifat nonlinear dan kontekstual. Reinhart dan Rogoff [2] menegaskan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan kebijakan makroekonomi yang hati-hati. Dengan demikian, teori pertumbuhan ekonomi menjadi *grand theory* yang menjelaskan dinamika pertumbuhan dalam sistem ekonomi.

Populasi

Populasi merupakan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Populasi berperan sebagai penyedia tenaga kerja sekaligus konsumen yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Hamid *et al.* [11] menyatakan bahwa dinamika populasi dan struktur demografis memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah. Selain itu, Badan Pusat Statistik [9] menunjukkan bahwa perubahan jumlah penduduk berimplikasi pada kebutuhan ekonomi dan sosial di tingkat regional.

Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi, populasi dipandang sebagai faktor strategis yang dapat mendorong atau menghambat pembangunan tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Hamid *et al.* [11] menegaskan bahwa populasi yang produktif dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan partisipasi ekonomi. Oleh karena itu, teori pembangunan ekonomi menjadi *grand theory* yang menjelaskan peran populasi dalam proses pembangunan.

Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan standar upah minimum bagi pekerja di suatu daerah. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Aprilya dan Juliprijanto [12] menyatakan bahwa UMR memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi melalui perubahan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan UMR juga berpengaruh terhadap dinamika pasar tenaga kerja di daerah.

Dalam kerangka teori ekonomi makro, kebijakan upah dipandang sebagai instrumen yang dapat memengaruhi permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Aprilya dan Juliprijanto [12] menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong konsumsi masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi kinerja ekonomi. Ramadhan dan Setyowati [13] menambahkan bahwa kebijakan UMR memiliki implikasi terhadap dinamika ketenagakerjaan. Dengan demikian, teori makroekonomi menjadi *grand theory* yang menjelaskan peran UMR dalam perekonomian.

Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Inflasi digunakan sebagai indikator stabilitas ekonomi karena mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Afandi [14] menyatakan bahwa inflasi memengaruhi kondisi makroekonomi dan kebijakan fiskal melalui perubahan daya beli dan biaya ekonomi. Bank Indonesia [15] juga menegaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Dalam perspektif teori makroekonomi, inflasi dipandang sebagai variabel penting yang memengaruhi stabilitas fiskal dan ekonomi. Hasdiana *et al.* [16] menyatakan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk stabilitas fiskal di negara berkembang. Afandi [14] menegaskan bahwa inflasi yang stabil cenderung menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif. Dengan demikian, teori makroekonomi dapat dijadikan sebagai *grand theory* yang menjelaskan peran inflasi dalam sistem perekonomian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data panel sederhana yang mencakup 38 provinsi di Indonesia selama periode 2023–2024. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 76 data.

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah utang daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, Upah Minimum Regional (UMR), dan inflasi. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1. Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Rumus
Utang (Y)	Utang publik adalah seluruh kewajiban keuangan pemerintah Indonesia yang berasal dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri untuk membiayai defisit anggaran negara.	$\text{PDB} = C + I + G + (X - M)$
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan perekonomian Indonesia dalam menghasilkan barang dan jasa yang diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun ke tahun.	$\text{PDB Riil} = \frac{\text{PDB Nominal}}{\text{Indeks Harga}} \times 100$
Populasi (X2)	Populasi adalah jumlah penduduk Indonesia yang menetap dalam suatu wilayah pada periode tertentu yang mencerminkan tekanan demografis terhadap perekonomian dan pembiayaan negara.	$\text{Jumlah Penduduk} = \sum\text{Penduduk}$
UMR (X3)	Upah Minimum Regional adalah standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai batas terendah upah pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.	$\text{KHL} = \sum(K_p + K_s + K_p n + K_k + K_t + K_r)$
Inflasi (X4)	Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu, yang diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).	$\text{IHK} = \frac{\sum(P_t \times Q_0)}{\sum(P_0 \times Q_0)} \times 100$

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. Sebelum dilakukan estimasi model, data diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, serta koefisien determinasi untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi utang daerah.

III. PEMBAHASA DAN HASIL

Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi. Data yang digunakan merupakan data panel sederhana dengan dua periode waktu, yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, sehingga total observasi dalam penelitian ini berjumlah 76 data.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	76	.12	16.77	2.63	3.95
Populasi	76	534.4	50345.2	7369.63	11206.91
UMR	76	1040244	5067381	3054822.43	672162.50
Inflasi	76	.44	6.71	2.31	1.15
Utang	76	.44	2801.30	82.45	329.73
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Data diolah, 2026

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk memaparkan karakteristik data penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum 0,12% (Papua Pegunungan) dan maksimum 16,77% (DKI Jakarta), dengan rata-rata 2,63% dan standar deviasi 3,96% yang mengindikasikan ketimpangan pertumbuhan antarprovinsi. Populasi memiliki nilai minimum 534,4 ribu jiwa (Papua Selatan) dan maksimum 50.345,2 ribu jiwa (Jawa Barat), dengan rata-rata 7.369,63 ribu jiwa dan standar deviasi 11.206,91 yang menunjukkan perbedaan demografi yang signifikan.

Variabel UMR menunjukkan nilai minimum Rp1.040.244 (Jawa Timur) dan maksimum Rp5.067.381 (DKI Jakarta), dengan rata-rata Rp3.054.822,43 dan standar deviasi Rp672.162,50, yang mencerminkan variasi upah antarprovinsi. Inflasi memiliki nilai minimum 0,44% (Sulawesi Utara) dan maksimum 6,71% (Aceh), dengan rata-rata 2,32% dan standar deviasi 1,15, yang menunjukkan kondisi inflasi relatif terkendali. Sementara itu, utang daerah memiliki nilai minimum 0,44 (Papua Selatan) dan maksimum 2.801,30 (DKI Jakarta), dengan rata-rata 82,45 dan standar deviasi 329,73, yang mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan antarprovinsi.

Tabel 3. Uji Normalitas

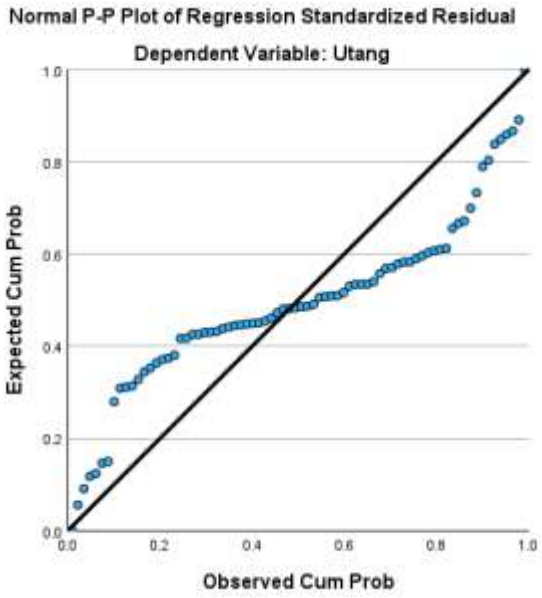

Sumber : Data diolah, (2026)

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Berdasarkan hasil Normal P–P Plot, sebaran titik residual berada di sekitar serta mengikuti garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-246.80	202.29		-1.22	.226		

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

	Pertumbuhan Ekonomi	75.39	15.09	.905	4.99	,001	.240	4.175
	Populasi	-.013	.006	-.446	-2.11	.038	.176	5.676
	UMR	7.885E-5	.000	.161	1.22	.223	.459	2.177
	Inflasi	-5.75	26.12	-.020	-.220	.825	.935	1.069

Sumber : Data diolah, (2026)

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai Tolerance 0,240 dan VIF 4,175; populasi memiliki Tolerance 0,176 dan VIF 5,676; UMR memiliki Tolerance 0,459 dan VIF 2,177; serta inflasi memiliki Tolerance 0,935 dan VIF 1,069. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga model regresi layak digunakan dan koefisien dapat diinterpretasikan secara reliabel.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-246.80	202.29		-1.22	.226
	Pertumbuhan Ekonomi	75.39	15.09	.905	4.99	,001
	Populasi	-.013	.006	-.446	-2.11	.038
	UMR	7.885E-5	.000	.161	1.22	.223
	Inflasi	-5.75	26.12	-.020	-.220	.825

Sumber : Data diolah, (2026)

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan populasi memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel UMR dan inflasi memiliki nilai signifikansi > 0,05, yang menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi belum sepenuhnya memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga diperlukan penyesuaian model, seperti penggunaan robust standard error, agar hasil estimasi tetap valid dan reliabel.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.665[a]	.442	.410	253.18676	1.865

Sumber : Data diolah, (2026)

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin–Watson (DW) untuk menguji independensi residual. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 1,865 yang mendekati nilai 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, asumsi independensi residual telah terpenuhi dan model regresi dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 7. Uji Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-246.80	202.29		-1.22	.226

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

	Pertumbuhan Ekonomi	75.39	15.09	.905	4.99	,001
	Populasi	-.013	.006	-.446	-2.11	.038
	UMR	7.885E-5	.000	.161	1.22	.223
	Inflasi	-5.75	26.12	-.020	-.220	.825

Sumber : Data diolah, (2026)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, UMR, dan inflasi terhadap utang daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang daerah (β = 75,39; Sig. = 0,001), serta menjadi variabel paling dominan dalam model. Populasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang daerah (β = –0,013; Sig. = 0,038), yang mengindikasikan bahwa daerah dengan jumlah penduduk besar cenderung memiliki ketergantungan utang yang lebih rendah. Sementara itu, UMR dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap utang daerah (Sig. > 0,05). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa variasi utang daerah lebih dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan demografi dibandingkan faktor pengupahan dan stabilitas harga pada 38 provinsi di Indonesia periode 2023–2024.

Tabel 8. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3603052.592	4	900763.148	14.052	,001[b]
	Residual	4551351.129	71	64103.537		
	Total	8154403.721	75			

Sumber : Data diolah, (2026)

Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh secara simultan pertumbuhan ekonomi, populasi, Upah Minimum Regional (UMR), dan inflasi terhadap utang daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 14,052 dengan signifikansi 0,001 (< 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap utang daerah. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan layak serta mampu menjelaskan variasi utang daerah pada 38 provinsi di Indonesia selama periode 2023–2024.

Tabel 9.
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-246.80	202.29		-1.22	.226
	Pertumbuhan Ekonomi	75.39	15.09	.905	4.99	,001
	Populasi	-.013	.006	-.446	-2.11	.038
	UMR	7.885E-5	.000	.161	1.22	.223
	Inflasi	-5.75	26.12	-.020	-.220	.825

Sumber: Data diolah, (2026)

Uji t dilakukan untuk menganalisis pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap utang daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang daerah (β = 75,39; Sig. = 0,001) serta menjadi variabel yang paling dominan dalam model. Populasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap utang daerah (β = –0,013; Sig. = 0,038), yang mengindikasikan bahwa daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar cenderung memiliki tingkat ketergantungan utang yang lebih rendah. Sementara itu, variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap utang daerah (Sig. > 0,05). Dengan demikian, secara parsial hanya pertumbuhan ekonomi dan

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

populasi yang berpengaruh signifikan terhadap utang daerah pada 38 provinsi di Indonesia selama periode 2023–2024.

Tabel 10. Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.665[a]	.442	.410	253.18676	1.865

Sumber: Data diolah, (2026)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,442, yang mengindikasikan bahwa sebesar 44,2% variasi utang daerah dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, populasi, Upah Minimum Regional (UMR), dan inflasi. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,410 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, model mampu menjelaskan 41,0% variasi utang daerah, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, model regresi memiliki daya jelaskan yang cukup baik untuk analisis utang daerah pada 38 provinsi di Indonesia periode 2023–2024.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika utang daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan bersama variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan inflasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan karakteristik demografis daerah berperan penting dalam menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengelola pertumbuhan ekonomi dan potensi kependudukan secara lebih strategis agar kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak selalu bergantung pada utang, serta mampu memperkuat kapasitas fiskal dan menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap utang daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat provinsi mendorong ekspansi belanja pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai oleh peningkatan pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah masih memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan. Hasil ini sejalan dengan Panizza dan Presbitero [1] yang menyatakan bahwa utang dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah memanfaatkan momentum pertumbuhan untuk mempercepat pembangunan. Dalam kerangka teori *crowding out*, peningkatan utang akibat ekspansi fiskal berpotensi menekan ruang pembiayaan sektor lain apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang efektif.

Populasi

Populasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap utang daerah, yang mengindikasikan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang besar cenderung memiliki tingkat utang daerah yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa populasi yang besar dapat memperluas basis penerimaan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal, sehingga ketergantungan terhadap utang relatif berkurang. Hasil ini sejalan dengan Ramadhan dan Setyowati [13], namun berbeda dengan Hamid *et al.* [11] yang menekankan bahwa populasi dapat meningkatkan tekanan fiskal. Dalam konteks teori *crowding out*, populasi tidak menjadi sumber tekanan utang apabila peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan produktivitas dan basis ekonomi yang kuat.

Upah Minimum Regional (UMR)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap utang daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat UMR antarprovinsi belum menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan pembiayaan utang daerah. Dampak UMR terhadap fiskal daerah

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.
http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar ,
jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719 (Online), p-ISSN: 2598-8700 (Printed) , Vol. 10 No.4 (November 2026)

cenderung bersifat tidak langsung, terutama karena kebijakan pengupahan lebih berpengaruh pada sektor swasta. Dalam perspektif teori *crowding out*, tidak signifikannya pengaruh UMR menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan belum menjadi sumber tekanan fiskal yang mendorong peningkatan utang daerah.

Inflasi

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap utang daerah, yang menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi selama periode penelitian masih berada dalam kondisi terkendali. Stabilitas inflasi membuat pemerintah daerah tidak perlu melakukan penyesuaian kebijakan utang secara agresif. Temuan ini sejalan dengan Afandi [14] yang menyatakan bahwa inflasi dalam kondisi stabil tidak memberikan tekanan langsung terhadap utang publik. Dalam kerangka teori *crowding out*, inflasi yang terkendali tidak meningkatkan biaya riil pembiayaan utang secara signifikan.

Pengaruh Simultan Variabel terhadap Utang Daerah

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, populasi, Upah Minimum Regional (UMR), dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap utang daerah. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika utang daerah merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor ekonomi dan demografis, sehingga tidak dipengaruhi oleh satu variabel tunggal. Dalam perspektif teori *crowding out*, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang mendorong ekspansi fiskal dan perbedaan kapasitas fiskal antarprovinsi dapat meningkatkan ketergantungan terhadap utang apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.

.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang daerah, sedangkan populasi berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap utang daerah. Namun, secara simultan seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap utang daerah pada 38 provinsi di Indonesia periode 2023–2024. Temuan ini memperkuat relevansi teori *crowding out*, yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah berpotensi mendorong penggunaan utang apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang efektif. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang kuat, terutama pada daerah dengan jumlah penduduk yang besar, dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap utang. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta memperkuat tata kelola fiskal guna menekan ketergantungan terhadap pembiayaan utang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain dan memperpanjang periode pengamatan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian ekonomi makro dan keuangan publik serta dikembangkan lebih lanjut melalui penggunaan pendekatan metodologis yang lebih beragam.

REFERENSI

[1] U. Panizza and A. F. Presbitero, "Public debt and economic growth: Is there a causal effect?," *Journal of Macroeconomics*, vol. 41, pp. 21–41, 2014.

[2] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff, "Growth in a time of debt," *American Economic Review*, vol. 100, no. 2, pp. 573–578, 2010. *(Catatan: Penulisan nama penulis di daftar pustaka awal tertulis "Rainhart", disesuaikan menjadi "Reinhart" sesuai sitasi teks dan nama asli penulis).*

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

[3] A. Afonso and J. T. Jalles, "Growth and productivity: The role of government debt," *International Review of Economics & Finance*, vol. 25, pp. 384–407, 2013. *(Catatan: Dikutip pada Bab I paragraf 2, namun belum tercantum di daftar referensi yang Anda kirimkan).*

[4] Amelia, "[Judul Artikel/Karya Ilmiah]," *[Nama Jurnal/Penerbit]*, 2023. *(Catatan: Dikutip pada Bab I paragraf 3, namun belum tercantum di daftar referensi yang Anda kirimkan).*

[5] Cili and Alkhaliq, "[Judul Artikel/Karya Ilmiah]," *[Nama Jurnal/Penerbit]*, 2021. *(Catatan: Dikutip pada Bab I paragraf 3, namun belum tercantum di daftar referensi yang Anda kirimkan).*

[6] Khairudin and R. Tanto, "Pengaruh kinerja hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2010-2013," *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 6, no. 1, pp. 95–110, 2015.

[7] Aminah, Khairudin, and Indrayenti, "Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung," *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, vol. 10, no. 1, pp. 22–33, 2019.

[8] M. S. Kumar and J. Woo, "Public debt and growth," *IMF Working Paper*, no. WP/10/174, 2010.

[9] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.

[10] S. Triwibowo, D. Oktaviani, and Nurfika, "Nonlinear analysis of growth's effect on debt: Finding the threshold," *Journal of Asian Economics*, vol. 82, art. no. 101512, 2024.

[11] A. Hamid, E. Tamba, and M. Nurfazry, "Population dynamics and regional economic performance," *Jurnal Demografi Indonesia*, vol. 8, no. 2, pp. 112–126, 2024.

[12] I. Apriliya and W. Juliprijanto, "Pengaruh jumlah penduduk, upah minimum regional, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 20, no. 1, pp. 45–58, 2022. *(Catatan: Penulisan di teks sebelumnya "Aprilya", disesuaikan dengan daftar pustaka menjadi "Apriliya").*

[13] B. A. Ramadhan and E. Setyowati, "Pengaruh populasi, UMR, dan IPM terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja," *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 55–68, 2023.

[14] M. F. Afandi, "Pengaruh nilai tukar, suku bunga dan inflasi terhadap utang luar negeri Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 2, pp. 145–158, 2022.

[15] Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.

[16] R. Hasdiana, J. Simamora, and D. Suharianto, "Inflasi dan stabilitas fiskal di negara berkembang," *Jurnal Keuangan Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 1–15, 2025.

DOI: 10.52362/jisamar.v10i4.2687
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.